

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminalisasi

A.1 Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan salah satu objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”.¹⁴

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kata Kriminalisasi*, diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 5 Februari 2020

¹⁵ Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press). hlm. 22.

Kriminalisasi, menurut Sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.¹⁶

Politik hukum diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷

Kemudian kriminalisasi juga merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum yang menurut Sudarto diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu.

¹⁶ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hlm. 2.

¹⁷ Ibid.

Politik hukum menyangkut *ius constituendum*, yaitu hukum pada masa mendatang yang dicita-citakan.¹⁸

Kemudian mengutip perkataan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa akhir dari “proses” yaitu berupa sebuah keputusan (*decisions*). Keputusan itu berasal dari penilaian dan pertimbangan norma atau kaidah terhadap perilaku individu atau umum yang berlaku di masyarakat. Menilai dan mengkaji suatu perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk sebagai perbuatan pidana dijustifikasi sebagai perbuatan pidana. Kemudian proses ini akan diakhiri dengan keputusan aparat penegak hukum atau para pembentuk undang-undang yang nantinya melahirkan produk hukum baru baik berupa revisi maupun pembentukan undang-undang baru.¹⁹

Dalam hal ini kriminalisasi itu tidak selalu berupa pembentukan undang-undang baru akan tetapi bisa juga melalui revisi atau penambahan atau peningkatan ataupun pemberatan sanksi pidana.

Kemudian, pengertian kriminalisasi dapat juga dilihat dari perspektif nilai. Dalam perspektif ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang ada di dalam masyarakat yang dimana sebelumnya perbuatan tersebut tidak termasuk kategori

¹⁸ John Kenedi. 2017. *Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)*. Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol 2 No. 1. Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu. Hlm. 23.

¹⁹ Tozilnutpam, Praverb Dot Net dan Agung Pramono, 2016, *Jangan Ada Sentimen*, Legal Trust, Edisi 16 Mei 2016, diakses dari <http://legal-trust.blogspot.com/2016/05/jangan-ada-sentimen.html> pada tanggal 14 Februari 2020.

perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana menjadi perbuatan yang tercela dan dituntut pidana. didalam perspektif nilai berkaitan juga dengan perspektif labeling, yakni kriminalisasi itu dianggap sebuah keputusan pembentuk undang-undang pidana untuk membri label terhadap sebuah tingkah laku manusia sebagai tindak pidana.²⁰

Jadi pengertian Kriminalisai berdasarkan pemikiran Paul Cornill, bahwa kriminalisasi itu tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, akan tetapi juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sebelumsudah diatur.²¹

A.2 **Pertimbangan Dilakukannya Kriminalisasi**

Salah satu pertimbangan dilakukannya kriminalisasi adalah melihat rasa kesusilaan masyarakat. Dari berbagai macam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum (sebagai kepentingan hukum) salah satunya adalah rasa kesusilaan masyarakat. Bangsa Indonesia yang telah terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya adalah

²⁰ Salman Luthan. Op., Cit. Hlm. 2.

²¹ Ibid.

perbuatan berhubungan sesama jenis dimana pelaku dan korban sama-sama berusia dewasa. Perbuatan hubungan sesama jenis ini diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang dewasa dimana keduanya tersebut berjenis kelamin yang sama, seperti perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki.

Perbuatan yang disebut oleh masyarakat lesbian dan gay ini pada dasarnya bertolak belakang dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai yang hidup dalam masyarakat ini tidak meyakini, jika berhubungan sesama jenis itu tidak dibenarkan, baik pelaku berusia dewasa dan korban berusia belum dewasa ataupun kedua nya sama-sama berusia dewasa atau sama-sama berusia belum dewasa. Maka dalam hal ini sebuah pernikahan dilakukan dengan sacral karena melahirkan sebuah kekuatan berupa ikatan suci yang nantinya menjadikan landasan terbentuknya sebuah keluarga yang sejahtera lahir dan batin atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, dan pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (perempuan), Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Laki-Laki). Inilah yang menjadi dasar jika perbuatan lesbian dan gay harus segera dikriminalisasikan karena nilai kesucian yang terkandung dalam sebuah pernikahan harus memiliki sebuah hukum yang melindungi.

Oleh karena itu untuk merespon banyaknya masyarakat yang menolak tentang perbuatan lesbian dan gay ini butuh adanya suatu

aturan hukum yang digunakan sebagai alat untuk mencegah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian masyarakat memandang sangat perlu adanya sanksi pidana untuk melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang dan dapat dijadikan sebagai sarana yang digunakan masyarakat dari hal-hal menyimpang.

Faktanya hingga saat ini hukum pidana belum menyentuh terkait dengan pengaturan hubungan sesama jenis sebagai suatu delik pidana. Sampai saat ini peraturan pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP, dimana peraturan tersebut masih pemberian dari negara Belanda yang biasa disebut *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) yang telah diterjemahkan dengan Bahasa Indonesia. Sehingga dalam KUHP tersebut negara Belanda tidak mengatur mengenai hubungan sesama jenis secara luas, karena perbuatan lesbian dan gay dirasa tidak termasuk tindak pidana oleh negara barat, negara Belanda adalah negara yang menganut paham liberalisme dimana negara tersebut memberikan kebebasan individual untuk setiap warga negaranya. Bahkan di dalam Rancangan KUHP Indonesia yang barupun peraturan mengenai hal ini juga tidak ditambahkan, untuk menjawab permasalahan mengenai hubungan sesama jenis dimana keduanya sama-sama berusia dewasa yang sedang berkembang akhir-akhir ini, bahkan bisa jadi beberapa tahun kedepan terdapat perbuatan hubungan sesama jenis diman keduanya sama-sama berusia belum dewasa. Sehingga dengan tidak adanya peraturan yang

mengatur ketika terjadi perbuatan seperti ini, terjadi kekosongan hukum karena tidak ada payung hukum yang menanganinya.

Oleh karena itu Sahetapy menganalogikan KUHP sebagai berikut :
 “Code Penal (baca KUHP) bagaikan sebuah celana yang dulu dipakai oleh ayah, kemudian beralih kepada anak yang sulung dan selanjutnya dengan tambalan sepotong kain yang diteruskan kepada anak yang kedua”.²²
 Sehingga di dalam pembaharuan hukum khususnya hukum pidana nantinya harus bernafaskan jiwa nasional dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.²³

Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan melalui kebijakan hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kondisi yang selalu berkembang pada masyarakat. Kebijakan hukum ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni membuat suatu pembaharuan hukum pidana terhadap system hukum pidana yang selama ini diperoleh dari beberapa Negara salah satunya Negara Belanda.

Pembaharuan hukum pidana nantinya, tentu saja tidak terlepas dari politik hukum yang memiliki tugas meneliti suatu perubahan-perubahan yang diadakan hukum agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang perlu di cukupi di dalam masyarakat. Nantinya politik hukum tersebut harus

²² Budi Sulistiyono dan Hari Purwadi dan Hartiwiningsih. 2000. Urgensi kriminalisasi kumpul kebo (*cohabitation*) dalam hukum Pidana Indonesia. Surakarta. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 6 No.2. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

²³ Ibid.

meneruskan tata tertib perkembangan hukum dari hukum yang di cita-citakan pada saat ini samapi ke hukum pada masa yang akan dating. Atau biasa disebut dari *Iud Constitutum* menuju *Ius Constituendum*.

A.3 Kriminalisasi sebagai Bagian dari Kebijakan Kriminal

A.3.1 Pengertian Kebijakan Kriminal

Sudarto, pernah mengemukakan tig aarti kebijakan kriminal, yaitu

.²⁴

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturn penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau

mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of

²⁴ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana). Hlm. 3.

the control of crime by society”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”.²⁵ Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah :²⁶

- a. *Criminal Policy is the science of responses.*
- b. *Criminal Policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime.*
- d. *Criminal Policy is rational total of the responses to crime.*

Memperhatikan tujuan-tujuan diatas, maka wajar jika politik kriminal merupakan salah satu bagian dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan tindak pidana, dapat dilakukan dengan sarana kebijakan hukum pidana dan dapat juga dilakukan dengan sarana pendekatan preventif.

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., Hlm. 4.

semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya.²⁷

Berdasarkan pendapat Edmundson, semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak benar. Pendapat ini menjelaskan hubungan logis antara konsep kesalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral, dan bisa dianggap sebagai kebenaran kecil atau sebagai ketetapan. Karena suatu tindakan dianggap salah bila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral.²⁸

Melihat dari sudut pandang tradisional yang dikemukakan oleh Molan, Bloy, dan Lanser, jika perilaku amoral sebagai kriteria kriminalisasi dianggap terlalu sederhana, karena ada tindakan yang tidak bermoral dan berbahaya, akan tetapi bukan perbuatan kriminal (contohnya : perzinahan), sementara yang lainnya tidak bermoral atau tidak berbahaya dan belum merupakan perbuatan kriminal, contohnya, kegagalan untuk mengenakan sabuk pengaman dan beberapa lainnya mengenai “kejahatan tanpa korban”.²⁹

²⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. 2005. *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). Hlm. 126.

²⁸ Lidya Suryani Widayati. 2018. *Kriminalisasi Perbuatan Cabul, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)*. Jakarta Pusat. Jurnal Bidang Hukum Info Singkat. Vol. 10 No.3. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

²⁹ Ibid.

Pada akhirnya, tujuan akhir dari kebijakan criminal itu memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai tujuan utama, seperti kebahagiaan, kemakmuran, kenyamanan, kesejahteraan masyarakat dalam mencapai keseimbangan. Pada intinya secara sederhana tujuan kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terwujudnya rasa aman, adil, makmur, tentram dan mencapai kesejahteraan yang diinginkan masyarakat.

A.3.2 Kriminalisasi dan Prasyarat dasar dalam perspektif Kebijakan Kriminal

Syarat mutlak adanya kriminalisasi yaitu dilakukan dengan memperhatikan undang-undang. Tidak dapat kriminalisasi di laksanakan tanpa adanya undang-undang, karena disini setiap akibat dapat ditentukan apa penyebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat, karena ini adalah konsekuensi berlakunya asas legalitas di dalam hukum pidana dimana maksud dari asas legalitas adalah tidak ada tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang.³⁰

Proses kriminalisasi itu dapat dimulai ketika suatu perbuatan telah diterapkan sebagai perbuatan tindak pidana di

³⁰ A'an Efendi, 2015, *Meluruskan Makna Kriminalisasi*, diakses melalui <http://www.gresnews.com/berita/opini/94728-meluruskan-makna-kriminalisasi/> pada tanggal 17 Februari 2020.

dalam undang-undnag. Dan kemduain kriminalisasi benar-benar terjadi ketikan rancangan undang-undang terkait dengan sutau perbuatan tersebut disahkan menjadi undang-undnang yang kemudian diundangkan. Maka dengan diundangkannya suatu perbuatan yang dimana awalnya bukan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana proses kriminalisasi disini sudah dapat diakui.³¹

Mengutip perkataan Arief dan Muladi, ada bebrapa tolak ukur yang harus diperhatikan yang dapat dijadikan pedoman kriminalisasi, yakni :³²

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori penyalahgunaan sanksi pidana;
2. Kriminalisasi tidak diperbolehkan tertuju pada satu tujuan saja / *ad hoc*;
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial.
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remidium.
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
6. Kriminalisasi harus bisa mendapatkan dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, meskipun itu hal kecil.

³¹ Ibid.

³² Muchlisin Riadi, 2018, *Pengertian, Ukuran dan Asas Kriminalisasi*, diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html> pada tanggal 17 Februari 2020.

8. Kriminalisasi harus memperhatikan jika setiap peraturan pidana itu membatasi kebebasan rakyat.

Disisi lain terdapat pendapat Soedarto, yang terdiri dari empat syarat jika akan melakukan kriminalisasi, yaitu:³³

1. Memperhatikan tujuan kriminalisasi, yakni menciptakan ketertiban masyarakat untuk negara yang sejahtera;
2. Memperhatikan alasan dilakukannya kriminalisasi, yakni perbuatan yang akan di kriminalisasikan telah menimbulkan kerusakan yang meluas bahkan menimbulkan korban;
3. Memperhatikan factor biaya dan hasil, dimana biaya yang dikeluarkan harus seimbang dengan hasil yang nantinya diperoleh;
4. Memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum tidak sampai melampaui batas dan bebannya.

B. Hukum Pidana

B.1 Pengertian Hukum Pidana

Mengutip perkataan Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana maka disebut tindak pidana. Hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dalam WvS, sedangkan di dalam kepustakaan digunakan istilah delik dan istilah yang digunakan para pembuat undang-undang adalah tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana.³⁴ Di

³³ Ibid.

³⁴ Mukhlis R, 2012, *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1. Hlm. 203.

dalam perundang-undangan menggunakan istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang dikemukakan oleh Sudarto, yakni :³⁵

1. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 pasal 14 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil;
2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
3. Hal yang diancam dengan hukum, digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
4. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, beberapa diantaranya :
 - a. UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
 - b. UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - c. Ketetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.

³⁵ Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang:UMM Press. Hlm 91-92

Simon mengatakan, *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Hamper sama halnya dengan Simon, Van Hamel mengatakan “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”.³⁶

Menurut salah satu ahli yang bernama Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang dirasa telah mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tidak hanya perbuatan yang merugikan diri sendiri, perbuatan yang dirasa membuat resah masyarakat luas juga dapat dikatakan suatu tindak pidana, karena dapat menghambat semangat yang di cita-citakan oleh masyarakat.³⁷

Jadi, melihat beberapa pendapat-pendapat dari beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dimana pelanggar akan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan.

B.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana

³⁶ Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 56.

³⁷ Ibid.

Menurut pendapat seorang ahli yakni Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 yakni :

Yang pertama dari sudut pandang teoritis, yakni berdasarkan pendapat para ahli yang terlihat dari bunyi rumusannya. Dan yang kedua, dari sudut pandang undang-undang yakni bagaimana realita tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu di dalam pasal peraturan perundang-undangan.³⁸

Konsep terkait dengan unsur-unsur tindak pidana secara teoritis lebih jelas Ketika paham terkait definisi-definisi tindak pidana dari para ahli. Tentu saja definisi unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan para ahli berbeda satu sama lain, namun tidak akan berbeda jauh. Begitupun, definisi unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut pandang undang-undang akan lebih jelas Ketika memahami pasal perpasal dalam suatu undang-undang yang berlaku.

B.2.1 Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Berdasarkan salah satu ahli yakni Moeljatno, berikut adalah unsur perbuatan pidana :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum obyektif;
- e. Unsur melawan hukum subyektif.

Yang harus diketahui meskipun di dalam rumusan delik tidak ada secara jelas tertulis unsur melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tetap memiliki sifat melawan hukum. Perbuatan tindak

³⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm 78-79

pidana tersebut sudah jelas merugikan diri sendiri ataupun orang banyak jadi sudah jelas bahwa sifat melawan hukum melekat pada perbuatan tersebut dan tidak perlu di nyatakan sendiri. Kemudian, meskipun perbuatan pidana pada umumnya keadaan dari unsur-unsur lahir, akan tetapi ada kalanya diperlukan perumusan unsur batin yakni sifat melawan hukum yang subjektif.³⁹

Kemudian menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Dipertanggung jawabkan.⁴⁰

Unsur-unsur yang dipaparkan oleh Prof. Moeljatno yakni unsur-unsur yang melihat dari sudut pandang penganut teori dualisme hukum pidana, teori ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur yang di paparkan oleh Prof. Moeljatno tersebut hanya berkaitan dengan tindak pidana dan sama sekali tidak menyinggung pertanggung jawaban pidananya. Kemudian jika Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Jonker itu penganut teori monism hukum pidana, teori ini membahas mengenai tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana.

Jadi secara garis besar, beberapa pendapat para ahli tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

³⁹ Moeljatno. Op., Cit. Hlm. 6

⁴⁰ Adami Chazawi. Op.Cit. Hlm 81.

yang sudah bisa bertanggung jawab dan perbuatan tersebut harus dilarang oleh undang-undang. Kemudian, perbuatan yang dilakukan tersebut harus mengandung unsur kesalahan baik unsur kesengajaan (*Dolus*) ataupun unsur kekhilafan (*Chulpa*). Sedangkan yang dikatakan unsur mampu bertanggung jawab adalah, dimana seseorang yang melakukan kesalahan tersebut sudah dikatakan dewasa oleh undang-undang dan sedang tidak berada dalam gangguan mental atau pengampuan.

B.2.2 Unsur Tindak Pidana Secara Undang - Undang

Terdapat dua unsur-unsur di dalam tindak pidana, yakni unsur obyektif yang menitik beratkan pada unsur diluar pelaku dan unsur subyektif yang menitik beratkan pada unsur dalam diri pelaku.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu Unsur :

- a. Tingkah laku.
- b. Melawan hukum.
- c. Kesalahan.
- d. Akibat konstitutif.
- e. Keadaan yang menyertai.
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.⁴¹

B.3.2 Jenis - Jenis Tindak Pidana

⁴¹ Ibid. Hlm 81-82

Mengutip pendapat Adam Chazawi jika tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni berdasarkan :

1. KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III.
2. Cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
4. Macam perbuatan, dapat dibedakan antara tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Saat dan jangka waktu terjadi, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama.
6. Sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Sudut subyek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana diperingan (*geprivilegieerde delicten*).⁴²

Mengutip pendapat Roeslan Saleh yakni “baik kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum

⁴² Ibid. Hlm 117-119

pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴³

Secara Kualitatif kejahatan dan pelanggaran dahulu memang dibedakan, dimana Ketika ada suatu perbuatan tanpa diatur dalam undang-undang akan tetapi sudah mencederai nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sudah termasuk kejahatan. Sedangkan, jika terdapat suatu perbuatan yang baru disadari baru disadari jika perbuatan tersebut telah mencederai nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat dan perbuatan tersebut sudah diatur di dalam undang-undang hal itu termasuk pelanggaran.

Akan tetapi semakin berkembangnya jaman pembagian secara kualitatif dirasa semakin tidak efektif, karena tidak semua perbuatan kejahatan yang diatur di dalam undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang mencederai norma di dalam masyarakat, begitupun dengan pelanggaran, banyak pelanggaran walaupun belum ada pengaturannya di dalam undang-undang di rasa mencederai norma-norma di dalam masyarakat. Saat ini antara kejahatan dan pelanggaran dibedakan secara kuantitatif, berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut.

C. Asas Legalitas

⁴³ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Aksara Baru. Hlm 107

Suatu perbuatan pidana harus berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, dan dilarangnya pemidanaan terhadap hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

C.1 Asas Legalitas Formil

Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP yang merupakan asas legalitas formil, yang menghendaki suatu perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan atau dalam Bahasa latinnya disebut dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*.

C.2 Asas Legalitas Materiil

Pasal 2 ayat (1) merupakan asas legalitas materiil, yang menghendaki bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan hukum yang hidup bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu, maka perbuatan tersebut patut dipidana.

D. Lesbian dan Gay

D.1 Pengertian Lesbian dan Gay

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia,⁴⁴ lesbian dan gay adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.

⁴⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 407.

Pengertian lesbian dan gay, sebagai berikut:⁴⁵

1. Lesbian adalah hubungan sepasang perempuan atau dapat dikatakan emosional perempuan yang tertarik kepada perempuan lain;
2. Gay adalah hubungan sepasang laki-laki atau dapat dikatakan secara emosional laki-laki lebih tertarik dan jatuh cinta kepada laki-laki lain.

Lesbianisme berasal dari kata Lebos, Lebos adalah nama sebuah pulau di luar Aegea, yang merupakan tempat lahir Sappo. Sappo adalah seorang perempuan yang dikenal sebagai pecinta perempuan, ia hidup pada zaman Yunani Kuno (550 M). Sejak saat itu ia disebut sebagai Sapposm (Cunnilingus), nama tersebut dikaitkan dengan perilaku hidup dalam kegiatan seksualnya.⁴⁶

Arti kata lesbian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.⁴⁷

Menurut pendapat Aan Ferguso (dalam Lasasti, 2011), lesbian adalah perempuan yang memiliki rasa suka dengan perempuan lain dan mengarah pada keinginan pengukuhan hubungan layaknya pasangan lawan jenis.⁴⁸

⁴⁵ Elfianti Ritonga dan Rosmadanti Pohan, Op., Cit.

⁴⁶ Wiraningtyas Ari Pangastuti, 2008, *Lesbian "Butchie" dalam novel lesbian laki-laki karya Deojha sebuah kajian ekspresivisme dan psikologi sastra*, diakses melalui https://repository.usd.ac.id/25364/2/024114039_Full%5B1%5D.pdf pada tanggal 17 Februari 2020.

⁴⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2002), hlm. 225

⁴⁸ Triana, 2015, *Lesbian adalah seorang pere*, Repository Universitas Medan Area, diakses melalui http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1629/5/108600061_FILE5.pdf pada tanggal 17 Februari 2020. Hlm. 10.

Kemudian menurut pendapat Sadarjoen, lesbian adalah seseorang yang pandai menyembunyikan rasa tertarik terhadap sesama jenis.⁴⁹

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa lesbian merupakan bagian dari lesbian dan gay, dimana lesbian dan gay itu sendiri diartikan sebagai suatu gejala dari dua orang berjenis kelamin sama, secara seksual merasa tertarik satu dengan yang lainnya dan keduanya terlibat dalam aktivitas seksual. Dalam hal ini terjadi ketertarikan seksual antara perempuan dengan perempuan.

Perilaku lesbian sebenarnya menitik beratkan pada sebuah hubungan emosional yang melibatkan rasa, kasih sayang, cinta antara dua orang yang berjenis kelamin sama yakni perempuan. Pemahaman ini melihat dari kesamaan makna kata lesbian dan gay. Stereotipe masyarakat yang mewajarkan dan memaklumi kedekatan sesama perempuan dalam berbagai aspek, membuat perilaku lesbian lebih sulit diketahui secara kasat mata, tetapi sikap tomboy pada perempuan dapat dijadikan praduga sementara untuk menentukan perilaku lesbian.

Ada 3 klasifikasi lesbian berdasarkan karakternya dan penampilan kesehariannya, yakni :

- *Butch*, yaitu lebih kelaki-lakian dalam berpenampilan, memiliki karakteristik tomboy, bersikap dan berpenampilan maskulin.
- *Femme*, yaitu lebih memiliki karakteristik feminisme, seperti perempuan pada umumnya dan bisa jadi tidak terlihat ciri lesbian

⁴⁹ Ibid.

sama sekali, bersikap dan berpenampilan anggun, cantik, feminim, menjaga sikap, dan suka merawat diri pada perempuan pada umumnya.

- *Androgyne*, yaitu bisa memiliki karakteristik keduanya *Butch* atau *Femme*, lesbian ini terkadang bisa berpenampilan tomboy akan tetapi tetap terlihat feminimnya, lesbian ini memiliki karakter yang fleksibel. Dalam relasi seksualnya lesbian ini bisa menyesuaikan, jadi saat bertemu dengan *Butchi* dia kan menjadi *femminim*, begitupun sebaliknya.⁵⁰

Kemudian Kartini Kartono dan Dali Gulo berpendapat, jika gay adalah penanaman kata pada lesbian dan gay yang digunakan untuk mengakui orientasi seksual mereka. Kemudian menurut Heru Kasida Brataatmaja, lesbian dan gay adalah pasangan sesame jenis.⁵¹

Yahya Mahsum dan Roellya Arrdhyaning Tyas berpendapat, orientasi seksual gay dan waria aadalah sama, akan tetapi secara penampilan gay lebih berjiwa laki-laki selayaknya sedangkan waria lebih berjiwa perempuan selayaknya. Jadi, sebenarnya gay dan waria itu tidak

⁵⁰ Novika Lusiana Sandra, 2018, *Konstruksi Sosial tentang Lesbian*, Repository Universitas Airlangga, diakses melalui http://repository.unair.ac.id/84444/4/JURNAL_Fis.S.27%2019%20San%20k.pdf pada tanggal 17 Februari 2020, Hlm. 11.

⁵¹ Abdul Azis Ramadhani, 2012, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam, Suatu Studi Komparatif Normatif*, Repository Universitas Hasanudin, diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6203/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA%20-%20ABD.%20AZIS%20RAMADHANI.pdf?sequence=2> pada tanggal 17 Februari 2020. Hlm. 34.

memiliki perbedaan orientasi seksual yang sangat signifikan. akan tetapi tetap ada yang membuat keduanya berbeda, yakni :⁵²

1. Dari cara pandang penampilan, orang gay secara fisiknya sama dengan laki-laki, dilihat dari sudut pandang Psikologis orang ini menganggap dirinya sebagai laki-laki.
2. Kemudian jika waria secara fisik dirinya ingin terlihat sebagai perempuan, dan jika dilihat dari sudut pandang Psikologis orang ini menganggap dirinya sebagai perempuan. Kemudian secara biologis, waria ini laki-laki dimana selayaknya yang memiliki organ reproduksi laki-laki pada umumnya. Memang akhir-akhir ini banyak para waria yang semula memiliki organ reproduksi laki-laki dirubah menjadi organ reproduksi perempuan, akan tetapi meskipun telah dirubah organ reproduksi ini tidak dapat berfungsi sebagai organ reproduksi perempuan, misal seperti haid dan tidak bisa hamil karena tidak memiliki Rahim dan sel telur.

D.2 Lesbian dan Gay dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Sejak dahulu, isu lesbian dan gay sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Dunia. Di Indonesia sendiri lesbian dan gay merupakan hal yang tabu dan tergolong masih hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jika ditinjau secara umum, kelompok lesbian dan gay termasuk kelompok marjinal, hal ini dikarenakan kelompok lesbian dan gay cenderung mendapatkan perlakuan tidak adil serta diskriminatif akibat persoalan gender.

Seorang wanita mengaku telah melakukan lesbian sejak era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1984. Hal ini membuktikan bahwa lesbian dan

⁵² Ibid.

gay ini bukan merupakan hal yang baru diperbincangkan di negara Indonesia.⁵³

Realitanya, keberadaan pelaku lesbian dan gay akhir-akhir ini telah menimbulkan banyak kontroversi diberbagai kalangan, karena pelaku lesbian dan gay di Indonesia ini semakin marak dan tidak mengenal batas usia, agama, status social dan pekerjaan. Banyaknya kontroversi yang terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya yakni aksi demonstrasi masyarakat Indonesia kepada aparat penegak hukum untuk mewujudkan penolakan terhadap legalisasi lesbian dan gay di Indonesia.

Penolakan terhadap perilaku lesbian dan gay bukan tanpa alasan melainkan disini masyarakat menilai perilaku tersebut dangatlah menyimpang dan masyarakat menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan norma dasar negara., oleh karena itu Sebagian besar masyarakat Indonesia menolak terkait perbuatan ini. Akan tetapi, meskipun banyak masyarakat yang menolak perbuatan ini dan pemerintah melarang dengan tegas melakukan lesbian dan gay, namun larangan atau pengaturan lesbian dan gay belum diatur secara jelas dan rinci.

Sebagaimana yang telah dipahami bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang terdapat pada kehidupan nyata bangsa

⁵³Muhammad Akbar, 2016, *Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia*, diakses melalui <http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisikperjalanan-lgbt-di-indonesia-part1>, pada tanggal 17 Februari 2020.

Indonesia (*local wisdom*) yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara.⁵⁴ Pancasila berfungsi sebagai dasar sekaligus ideologi Negara. Makna dasar merujuk pada pedoman ataupun landasan, sehingga Pancasila dijadikan sebuah pedoman dalam menjalankan seluruh sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber oleh karena itu seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi Negara Indonesia. Ideologi yaitu gagasan yang berdasarkan pemikiran mendalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat.⁵⁵ Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.⁵⁶ Dalam konteks ideologi negara, maka Pancasila digunakan sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Artinya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang disepakati bersama dibutuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka pemikirannya.

⁵⁴ Wawan Setiawan dan Yudhitiya Dyah Sukmadewi. 2017. *"Peran Pancasila pada era globalisasi" kajian terhadap Pancasila dan fenomena LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) di Indonesia*. Semarang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 19 No. 1. Semarang.

⁵⁵ Syahrial Syarbaini. 2014. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa)*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm.87.

⁵⁶ Ibid.

Implementasi larangan cabul sesama jenis dinilai memiliki makna yang luas sehingga mampu mencakup perbuatan lesbian dan gay atau sodomi, walaupun hanya terbatas mencakup perbuatan lesbian dan gay atau sodomi yang dilakukan terhadap seorang anak. Dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Soesilo mengemukakan mengenai pengertian “perbuatan cabul” yaitu seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-rab anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, cium-ciuman, dan lain sebagainya.⁵⁷

Terdapat sebuah Pasal di dalam KUHP⁵⁸ Indonesia yang berisikan larangan dilakukannya perbuatan cabul, yakni :

Pasal 292 KUHP, menyatakan bahwa:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal ini adalah pasal yang memuat istilah larangan perbuatan cabul sesama jenis. Akan tetapi implementasinya, Ketika terjadi kasus pencabulan berdasarkan isi pasal 292 KUHP tidak sedikit hakim dalam

⁵⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia : Bogor, 1995), hlm. 212.

⁵⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. 27, (Bumi Aksara : Jakarta, 2008), hlm. 106-108.

memutus suatu perkara terkait perbuatan lesbian dan gay ini menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena hakim berpikir bahwa korbannya adalah seorang dibawah umur atau anak-anak. Dan di Indonesia hanya mengatur sebatas perbuatan lesbian dan gay seperti diatas, belum ada aturan ketika pelaku dan korban lesbian dan gay tersebut berusia sama-sama dewasa ataupun sebaliknya sma-sama berusia dibawah umur sehingga disini terjadi kekosongan hukum, melihat banyaknya perbuatan lesbian dan gay disemua usia khususnya yang paling banyak yakni diusia dewasa.

Kemudian berbagai tindakan penolakan tersebut juga didasarkan oleh masyarakat yang menilai adanya kekosongan hukum di Indonesia, bahwa hingga sampai saat ini perbuatan lesbian dan gay yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak diatur secara rinci dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun jika perbuatan lesbian dan gay dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak, para penegak hukum di Indonesia tidak jarang menerapkan pasal larangan perbuatan cabul sesama jenis baik yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, padahal terminologi cabul yang digunakan oleh penegak hukum dalm memidanakan para pelaku dinilai kurang tepat jika diterapkan terhadap perbuatan lesbian dan gay.⁵⁹

⁵⁹ Basit Barry, 2018, *Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia*, Hasil Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 1.

Jadi, dengan jelas pelanggaran perilaku lesbian dan gay sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/ perselingkuhan, dan seks bebas samasekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi pemuliaan generasi. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa.

